

**URGENSITAS PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KALA PANDEMI
CORONAVIRUS DISEASE-2019 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36
TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH :

AHMAD ADIYAAT ALQARNI

1710012111032

BAGIAN HUKUM

TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2021

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

Reg.No : 04/Skripsi/HTN/FH/III-2021

Nama : Ahmad Adiyaat Alqarni
NPM : 1710012111032
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Urgensitas Pemilihan Kepala Daerah Di Kala Pandemi
Coronavirus Disease-2019 Ditinjau Dari Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Dikaitkan Dengan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke website

Dr.Maiyestati, S.H, M.H.,

(Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Uning Pratimaratri S.H., M.Hum)



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag,M.H)

**URGENSITAS PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KALA PANDEMI
CORONAVIRUS DISEASE-2019 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36
TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

Ahmad Adiyat Alqarni¹, Maiyestati¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : Ahmad.Adiyat44@gmail.com

ABSTRACT

The local election has managed by UUD Indonesia number 10 on(th) 2016 about governor's election, regent's election and mayor's election. the local election on 2020 has stopped because of covid 19. The problem are : 1). how to implement local election in pandemic? 2). does the implementation of local election managed in UUD RI number 10 th 2016 about governor's election, regent's election and also mayor's election opposite by UUD number 36 th 2009 about the health in pandemic. The research method is used law research which basically mean about Research that assesses the study of documents. The main data are primer and sekunder. the qualitative analysis which not using numeral, but giving describing from Research results can be deduced that : 1). the implementation of local election which managed by UUD number 10 th 2016 about governor's election, regent's election, and mayor's election become UUD when in covid 19 must be applied because the urgency of local election certain. the local election in covid 19 if reviewed by UUD number 36 th 2009 about the health can be opposed by health building principles. it's because the implementation of local election incompatible with health principles that government must precede the nation in pandemic beside with the implementation of election in this pandemic

Keywords : Urgent, Governor's election, Coronavirus Disease-2019

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan merupakan upaya agar dapat diwujudkan otonomi daerah oleh calon kepala daerah yang terpilih. Pemilihan kepala daerah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Dalam hal ini pilkada yang akan dilakukan masih buram pelaksanaannya, hal ini dikarenakan agenda politik negara yang harus dilaksanakan tiap tahunnya dapat terhambat oleh pandemi virus corona.

Berdasarkan hipotesis diatas penulis mengindikasikan terjadinya kekaburan norma dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dan juga eksistensi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dalam pelaksanaannya di masa pandemi COVID-19 yang patut dipertanyakan. Penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana urgensi dari peraturan perundang-undangan tentang pemilihan kepala daerah di masa pandemi. Maka dari itu, penulis tertarik membahas penelitian ini dengan judul "Urgensi Pemilihan

Kepala Daerah Di Kala Pandemi *Coronavirus Disease-2019* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota”

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Urgensi Pemilhan Kepala Daerah pada saat pandemic *Coronavirus Disease-2019* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota?
2. Apakah pelaksanaan Pemilihan kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di masa pandemi ?

METODE

Jenis penelitian

yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.¹

Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer itu meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

4) World Health Organization (WHO)

Teknik Pengumpulan Data

Studi dokumen, studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek yang di teliti. Dokumen yang diteliti dalam penelitian ini berupa Undang-Undang buku-buku, serta jurnal-jurnal yang terkait dengan judul penelitian.

Teknik Analisis Data

Cara analisi data yang dilakukan penulis adalah analisi kualitatif, merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan mengutamakan mutu atau kualitas dari data, dan bukan kuantitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi pemilihan kepala daerah (pilkada) dimasa pandemi

Dilihat dalam keadaan pandemi yang terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia, pemilihan yang dilaksanakan dapat terjadi dikarenakan urgensi dari pemilihan tersebut.

kementrian dalam negeri (kemendagri) Saydiman Marto menjelaskan urgensi pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 harus dilaksanakan di masa pandemi Covid-19. Antara lain yang dimaksud yaitu :

1. Mengurangi praktik kepemimpinan pemerintah daerah yang terlalu banyak dipimpin pejabat sementara atau

¹ Bambang Sunggono, 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42

pelaksana tugas (Plt) yang memiliki kewenangan terbatas.

2. Terpilihnya kepala daerah yang dipercaya publik karena terbukti mampu menangani pandemi Covid-19 di daerahnya.
3. Terakhir adalah untuk memacu perekonomian di tengah krisis Covid-19

B. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di masa pandemi

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang telah disepakati oleh pemerintah pada masa wabah covid-19 ini terjadi karena urgensi pemilihan kepala daerah itu sendiri. Apabila ditinjau dari asas pembangunan kesehatan maka pemilihan kepala daerah pada masa pandemi sangat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, hal ini dikarenakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut tidak sejalan dengan asas kesehatan yang mana pemerintah harus mendahului hak-hak rakyat pada masa pandemi yaitu untuk melindungi rakyat dari covid-19 dibandingkan dengan melaksanakan pemilihan pada masa pandemi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam hasil penelitian dan pembahasan penulis maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut, Pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada masa pandemi *coronavirus disease* apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dapat dikatakan bertentangan dengan asas pembangunan kesehatan. Hal ini

dikarenakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut tidak sejalan dengan asas kesehatan yang mana pemerintah harus mendahului hak-hak rakyat pada masa pandemi dibandingkan dengan melaksanakan pemilihan pada masa pandemi. Akan tetapi berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2020 Pemilihan Kepala Daerah tetap dilaksanakan pada masa pandemi.

Saran

Diharapkan kepada legislatif atau pembuat Undang-Undang agar dapat merevisi kembali Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, menyangkut penyelenggaraan pemilihan dikala terjadi bencana dan juga pemilihan susulan yang terdapat pada Pasal 120 dan 121 agar dapat tercipta kepastian hukum dan kemanfaatan hukum yang dapat dirasakan menyeluruh oleh semua rakyat indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu **Dr.Maiyestati, S.H, M.H.**, selaku Dosen Pembimbing dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu, dan memberikan nasehat maupun saran agar penulis skripsi ini dapat terselsaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Sunggono,2013. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta